



LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

**TAHUN
2025**

Disiapkan oleh:

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Lamongan
Megilan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Manajemen risiko merupakan uraian tentang upaya BPKAD untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dokumen pelaksanaan penilaian risiko merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP dalam suatu instansi pemerintah. Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Lamongan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas.

Lamongan, Mei 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Drs. M.S. HERUWIDI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690219 198809 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. DASAR HUKUM | 2 |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| D. RUANG LINGKUP | 3 |
| II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN..... | 3 |
| A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI | 3 |
| B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN | 4 |
| III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN | 4 |
| A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN | 4 |
| B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO..... | 5 |
| C. HASIL ANALISIS RISIKO..... | 8 |
| D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN | 13 |
| E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN | 14 |
| IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI..... | 17 |
| V. RANCANGAN PEMANTAUAN | 18 |
| VI. PENUTUP | 19 |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan pengelolaan BMD yang optimal ; (2) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur keuangan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan risiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Didorong dengan adanya kesadaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian risiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian risiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis

- organisasi dan peningkatan kinerja;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan telaah ulang;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif.

Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian risiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian risiko pada unit kerja urusan keuangan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi.

Sedangkan untuk hasil penilaian terkait komitmen terhadap kompetensi, apabila dari hasil review dokumen telah cukup memadai namun dari hasil survei persepsi masih kurang memadai.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap tribulan. Pemantauan pengendalian risiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian risiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan nilai hasil survei persepsi terkait komitmen terhadap kompetensi yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai baik terkait pengelolaan dasar keuangan maupun pengelolaan risiko secara terintegrasi dan berkala. Hal ini diharapkan guna memperbaiki lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko yang baik di unit kerja masing-masing pegawai.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memperhatikan dan mengacu pada RPJMD. Adapun sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal” dengan indikator Opini BPK. Sehingga tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan sasaran. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu

tahunan maka sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal”.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa suatu risiko. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun hasil identifikasi risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional. Adapun uraian identifikasi risiko sebagai berikut :

Tabel III.1 Identifikasi Risiko Strategis OPD

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Risiko | | | Sebab | | C/UC | Dampak | |
|----|---|--|--|-----------------|---|---|------------------------|------|--|--------------------------|
| | | | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| | | | | Risiko | | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
| 1. | Tujuan: Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah | Opini BPK | Tidak bisa mempertahankan WTP | RSO.24.37.09.00 | BPKAD Kab. Lamongan | Kurangnya konsistensi dan pengawasan serta penurunan kualitas dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah | Eksternal dan Internal | C | Opini atas LKPD menjadi turun | Pemerintah Kab. Lamongan |
| 2 | Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal dan Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah | Prosentase Akurasi penganggaran APBD | Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri | RSO.25.37.09.01 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Aplikasi belum optimal, terkendalanya aplikasi yg sedang eror atau maintenance dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh OPD | Eksternal dan Internal | C | Keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD | Pemerintah Kab. Lamongan |
| | | Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target | Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja | RSO.25.37.09.02 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kurangnya akurasi dalam penyusunan rencana kas bulanan oleh SKPD | Eksternal dan Internal | C | Gangguan arus kas yang berdampak pada pelaksanaan program lainnya | Pemerintah Kab. Lamongan |
| | | Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP | Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP | RSO.25.37.09.03 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Ketidaktahuan OPD atas format dan aturan pelaporan yang sesuai SAP | Eksternal dan Internal | C | Penyampaian LKPD menjadi terlambat dan tidak tepat waktu sehingga berpotensi Opini atas Laporan Keuangan menurun | Pemerintah Kab. Lamongan |
| | | Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset | Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi | RSO.25.37.09.04 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Keterbatasan SDM dan kurangnya pembaruan data terkait status kepemilikan | Eksternal dan Internal | C | Aset daerah tidak dimanfaatkan secara optimal atau hilang tanpa diketahui | Pemerintah Kab. Lamongan |

Tabel III.2 Identifikasi Risiko Operasional OPD

| No | Kegiatan | Indikator Keluaran | Risiko | | | | Sebab*) | | C/UC | Dampak**) | |
|----|--|--|--------------|---|-----------------|--------------------------------------|---|------------------------|------|--|--------------------------|
| | | | Tahap | Uraian | Kode | Pemilik | Uraian | Sumber | | Uraian | Pihak yang Terkena |
| | | | | | Risiko | | | | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun | Penganggaran | Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan | ROO.24.37.09.01 | Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan | Adanya perencanaan awal anggaran yang masih belum matang serta kebutuhan anggaran yang mendesak | Eksternal dan Internal | C | Penyusunan Perencanaan APBD menjadi tidak efisien dalam menjalankan program kinerja daerah | Pemerintah Kab. Lamongan |
| 2 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun | Pelaksanaan | Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD | ROO.24.37.09.03 | Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan | Kelalaian bendahara terhadap perhitungan perpajakan serta adanya perbedaan aplikasi dalam perhitungan pajak | Eksternal dan Internal | C | Mendapatkan teguran dan penagihan adanya kurang bayar. Serta denda administrasi dan sanksi dari instansi pajak apabila tidak segera dibayarkan | Pemerintah Kab. Lamongan |
| 3 | Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun | Pelaksanaan | Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah) | ROO.24.37.09.07 | Bidang Aset BPKAD Lamongan | 1. Dokumen perjanjian pemanfaatan aset daerah masih menggunakan perda lama (harga lama) tidak disesuaikan dengan harga baru 2. Belum memiliki pejabat penilai dalam melakukan proses penilaian aset daerah | Eksternal dan Internal | C | Kurangnya pemanfaatan aset daerah dapat menurunkan pendapatan asli daerah yang bisa digunakan dalam pembangunan daerah | Pemerintah Kab. Lamongan |
| 4 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang di susun | Pelaporan | Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi | ROO.24.37.09.08 | Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan | 1. Kurangnya koordinasi dan pemahaman admin OPD atas pencatatan transaksi keuangan 2. Adanya sistem rekonsiliasi yang berjalan tidak efektif antar OPD | Eksternal dan Internal | C | Mengakibatkan laporan konsolidasi tidak valid dan akuntabel, serta menurunkan kualitas dan opini audit LKPD | Pemerintah Kab. Lamongan |

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Analisis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis risiko dibutuhkan guna mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan. Serta menetapkan skala dan status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian risiko dan konsekuensi atau dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan, sebagai berikut:

Tabel III.3 Kriteria Kemungkinan Risiko

| Kriteria Risiko | |
|----------------------|---------------|
| Kriteria Kemungkinan | |
| Nilai Kemungkinan | Keterangan |
| 1 | Sangat Jarang |
| 2 | Jarang |
| 3 | Kadang-Kadang |
| 4 | Sering |
| 5 | Sangat Sering |

Tabel III.4 Kriteria Konsekuensi / Dampak Risiko

| Kriteria Risiko | |
|------------------------|-------------------|
| Kriteria Dampak Risiko | |
| Nilai Dampak | Keterangan |
| 1 | Tidak Signifikan |
| 2 | Kurang Signifikan |
| 3 | Sedang |
| 4 | Signifikan |
| 5 | Sangat Signifikan |

Setelah mengetahui tingkatan skala atau level dari kemungkinan dan dampak risiko, maka perlu juga mengetahui tingkatan risiko dimana tingkatan risiko merupakan hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Pengukuran tingkatan risiko diperlukan guna mengetahui dan menetapkan status risiko yang akan di uraikan. Perhitungan nilai tingkatan risiko sebagai berikut :

Tabel III.5 Tingkatan Risiko

| Skala | Kemungkinan | Konsekuensi/Dampak | | | | |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|--------|------------|-------------------|
| | | Tidak Signifikan | Kurang Signifikan | Sedang | Signifikan | Sangat Signifikan |
| 5 | Sangat Sering | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | Sering | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 3 | Kadang-kadang | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | Jarang | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 1 | Sangat jarang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Keterangan :

Nilai ≤ 4 = Hijau

Nilai 9 – 14 = Oranye

Nilai 5 – 8 = Kuning

Nilai $15 - 25 = \text{Merah}$

Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang referensi nilai kemungkinan dan referensi nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari risiko dengan tingkat terbesar sampai dengan tingkat terkecil. Peringkat status risiko ditentukan berdasarkan tingkat dampak risiko dan kemungkinan kejadian risiko. Adapun uraian status risiko sebagai berikut:

Tabel III.6 Status Risiko

| Skala | Kemungkinan | Konsekuensi/Dampak | | | | |
|-------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Tidak Signifikan | Kurang Signifikan | Sedang | Signifikan | Sangat Signifikan |
| 5 | Sangat Sering | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| 4 | Sering | Sedang | Sedang | Tinggi | Sangat tinggi | Sangat tinggi |
| 3 | Kadang-kadang | Rendah | Sedang | Tinggi | Tinggi | Sangat |
| 2 | Jarang | Rendah | Rendah | Sedang | Sedang | Tinggi |
| 1 | Sangat jarang | Rendah | Rendah | Rendah | Sedang | Sedang |

Keterangan :

Hijau = Rendah

Oranye = Tinggi

Kuning = Sedang

Merah = Sangat Tinggi

Dari tabel penilaian analisis tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun analisis risiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis risiko strategis maupun risiko operasional, sebagai berikut :

| No | Entitas | Risiko Prioritas | Kode Risiko | Skala Risiko | Pemilik Risiko | Penyebab | Dampak |
|-----------------------------|--|--|-----------------|--------------|---|---|--|
| Risiko Strategis OPD | | | | | | | |
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri | RSO.25.37.09.01 | 10 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Aplikasi belum optimal, terkendalanya aplikasi yg sedang eror atau maintenance dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh OPD | Keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja | RSO.25.37.09.02 | 12 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kurangnya akurasi dalam penyusunan rencana kas bulanan oleh SKPD | Gangguan arus kas yang berdampak pada pelaksanaan program lainnya |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP | RSO.25.37.09.03 | 7 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Ketidaktahuan OPD atas format dan aturan pelaporan yang sesuai SAP | Penyampaian LKPD menjadi terlambat dan tidak tepat waktu sehingga berpotensi Opini atas Laporan Keuangan menurun |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi | RSO.25.37.09.04 | 10 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Keterbatasan SDM dan kurangnya pembaruan data terkait status kepemilikan | Aset daerah tidak dimanfaatkan secara optimal atau hilang tanpa diketahui |

Gambar 1 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Strategis Si Mario

| Risiko Operasional OPD | | | | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------|----|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan | ROO.25.37.09.01 | 14 | Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan | Adanya perencanaan awal anggaran yang masih belum matang serta kebutuhan anggaran yang mendesak | Penyusunan Perencanaan APBD menjadi tidak efisien dalam menjalankan program kinerja daerah |
| 2 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD | ROO.25.37.09.02 | 10 | Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan | Kelalaian bendahara terhadap perhitungan perpajakan serta adanya perbedaan aplikasi dalam perhitungan pajak | Mendapatkan teguran dan penagihan adanya kurang bayar. Serta denda administrasi dan sanksi dari instansi pajak apabila tidak segera dibayarkan |
| 3 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah) | ROO.25.37.09.03 | 5 | Bidang Aset BPKAD Lamongan | 1. Dokumen perjanjian pemanfaatan aset daerah masih menggunakan perda lama (harga lama) tidak disesuaikan dengan harga baru 2. Belum memiliki pejabat penilai dalam melakukan proses penilaian aset daerah | Kurangnya pemanfaatan aset daerah dapat menurunkan pendapatan asli daerah yang bisa digunakan dalam pembangunan daerah |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi | ROO.25.37.09.04 | 7 | Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan | 1. Kurangnya koordinasi dan pemahaman admin OPD atas pencatatan transaksi keuangan 2. Adanya sistem rekonsiliasi yang berjalan tidak efektif antar OPD | Mengakibatkan laporan konsolidasi tidak valid dan akuntabel, serta menurunkan kualitas dan opini audit LKPD |

Gambar 2 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Risiko Operasional Si Mario

Dari kedua gambar hasil analisis risiko yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa hasil analisis risiko strategis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Risiko Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri memiliki nilai skala Risiko sebesar 10 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan sangat sering terjadi namun dampak yang dihasilkan kurang signifikan akan tetapi risiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Risiko Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja memiliki nilai skala risiko sebesar 12 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.
3. Risiko Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP memiliki nilai skala risiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong sedang.
4. Risiko Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi memiliki nilai skala risiko sebesar 10 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan kadang-kadang terjadi dan dampak yang dihasilkan cukup signifikan atau sedang sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.

Sedangkan hasil analisis risiko operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Risiko Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan memiliki nilai skala risiko sebesar 14 dengan warna oranye, yang artinya memiliki kemungkinan sering terjadi namun dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.
2. Risiko Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD memiliki nilai skala risiko sebesar 10 dengan warna Oranye, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan sangat signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong tinggi.

3. Risiko Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah) memiliki nilai skala risiko sebesar 5 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sangat jarang terjadi namun dampak yang dihasilkan juga sangat signifikan sehingga risiko yang dimiliki masih tergolong sedang.
4. Risiko Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi memiliki nilai skala risiko sebesar 7 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi dan dampak yang dihasilkan cukup signifikan sehingga risiko yang dimiliki tergolong sedang.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi risiko strategis sebagai berikut:

1. Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Jadwal penginputan anggaran pada aplikasi SIPD Kemendagri sudah disusun dan disosialisasikan.
2. Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Pemantauan realisasi belanja telah dilakukan secara bulanan.
3. Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP dengan pengendalian risiko yang sudah ada Adanya pedoman Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.
4. Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Telah dilakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi terhadap pelaporan aset daerah secara tribulanan.

Selain itu kegiatan yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengatasi

risiko operasional sebagai berikut :

1. Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan dengan pengendalian Risiko yang sudah ada yakni Terdapat mekanisme penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran terkait perubahan / pergeseran APBD.
2. Adanya selisih atau lebih bayar dalam penyetoran pajak oleh Bendahara OPD dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Koordinasi secara rutin dan berkala pada masing-masing Bendahara terkait aturan perpajakan dan pelaporan.
3. Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah) dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Adanya pengaturan dan syarat terkait harga melalui peraturan atau perjanjian sewa terhadap penggunaan BMD.
4. Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi dengan pengendalian risiko yang sudah ada yakni Telah dilakukan Konsolidasi data secara bulanan, triwulanan, tahunan.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tindakan preventif dan mitigasi. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Dalam setiap tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja akan masih ada celah pengendalian yang dapat memberikan dampak buruk bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga perlu di bangun tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing risiko baik risiko strategis

maupun operasional sebagai berikut :

Tabel III.7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

| Uraian Risiko | Pengendalian Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian |
|--|--|--|--|
| Risiko Strategis | | | |
| Keterlambatan Penginputan data pagu anggaran Pada Aplikasi SIPD Kemendagri | Jadwal penginputan anggaran pada aplikasi SIPD Kemendagri sudah disusun dan disosialisasikan | Kurangnya pengawasan dan sanksi terhadap keterlambatan input data oleh OPD | Adanya sanksi tegas terkait keterlambatan dalam penginputan SIPD |
| Ketidaksesuaian Rencana Anggaran Kas dengan Realisasi belanja | Pemantauan realisasi belanja telah dilakukan bulanan | Ketidaksesuaian antara estimasi dan realisasi akibat perubahan kebijakan fiskal daerah | Optimalisasi penggunaan data historis dan trend analisis untuk perencanaan anggaran kas. |
| Dokumen pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak sesuai dengan SAP | Adanya pedoman Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan | Kurangnya pemahaman teknis dari beberapa operator OPD terhadap format SAP. | Pelatihan teknis serta pendampingan secara berkala untuk operator dan penyusunan panduan pelaporan. |
| Masih terdapat aset daerah yang belum tercatat dan terverifikasi | Telah dilakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi terhadap pelaporan aset daerah secara tribulanan | Masih baterdapat OPD yang belum menyerahkan data aset secara lengkap dan akurat. | Melaksanakan audit secara menyeluruh serta pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah |

| Uraian Risiko | Pengendalian Sudah Ada | Celah Pengendalian | Rencana Tindak Pengendalian |
|---|--|--|--|
| Risiko Operasional | | | |
| Tingginya frekuensi perubahan / pergeseran anggaran selama tahun berjalan | Terdapat mekanisme penyusunan regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran terkait perubahan / pergeseran APBD | Proyeksi anggaran awal kurang akurat dan seringkali tidak dapat memperhitungkan dinamika kebijakan fiskal daerah | Peningkatan akurasi perencanaan melalui analisis historis dan keterlibatan aktif OPD dalam koordinasi terkait penganggaran |
| Terdapat rekayasa dokumen dalam membantu proses pencairan dana | Koordinasi secara rutin dan berkala pada masing-masing Bendahara terkait aturan perpajakan dan pelaporan | Kurangnya ketelitian pada saat verifikasi ulang atas data setor pajak yang dilakukan oleh OPD. | Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan sistem e-billing pajak daerah. |
| Pemanfaatan aset BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu dengan harga di bawah rata-rata (murah) | Adanya pengaturan dan syarat terkait harga melalui peraturan atau perjanjian sewa terhadap penggunaan BMD | Adanya oknum yang menyalahi peraturan dan syarat terkait harga sewa penggunaan BMD | Penilaian ulang nilai aset secara berkala melalui tim appraisal independen. |
| Kesalahan pada posting akun dalam laporan keuangan konsolidasi | Telah dilakukan Konsolidasi data secara bulanan, triwulanan, tahunan realisasi | Terdapat kelalian dalam proses input penyusunan laporan keuangan oleh admin keuangan | Sinkronisasi data antara data manual dengan SIPD |

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Guna mendukung berjalannya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Media penyampaian informasi yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penyedia Informasi | Penerima Informasi |
|--|---|--|--------------------------------------|---|
| Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: | | | | |
| 1 | Adanya sanksi tegas terkait keterlambatan dalam penginputan SIPD | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |
| 2 | Optimalisasi penggunaan data historis dan trend analisis untuk perencanaan anggaran kas. | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |
| 3 | Pelatihan teknis serta pendampingan secara berkala untuk operator dan penyusunan panduan pelaporan. | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Aset BPKAD Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |
| 4 | Melaksanakan audit aset secara menyeluruh serta pelaksanaan digitalisasi dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |

Gambar 3 Lampiran Form 8 Infokom Risiko Strategis Si Mario

| | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|
| Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: | | | | |
| 1 | Peningkatan akurasi perencanaan melalui analisis historis dan keterlibatan aktif OPD dalam koordinasi terkait penganggaran | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |
| 2 | Peningkatan pengawasan dan pemanfaatan sistem e-billing pajak daerah. | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Perbendaharaan BPKAD Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |
| 3 | Penilaian ulang nilai aset secara berkala melalui tim appraisal independen. | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Aset BPKAD Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |
| 4 | Sinkronisasi data antara data manual dengan SIPD | Koordinasi dan Rekonsiliasi kepada pihak-pihak terkait | Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan | Seluruh OPD di Pemerintah Kab. Lamongan |

Gambar 4 Lampiran Form 8 Infokom Risiko Operasional Si Mario

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko informasi dan komunikasi penting untuk dilakukan agar dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen pengendalian yang telah di susun secara efektif. Terutama dalam hal terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi risiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi pemantuan penyusunan Perda dan Perbup, penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan APBD, pengamanan asset serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Bentuk atau metode pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah dengan senantiasa melakukan pendampingan secara langsung melalui rekonsiliasi setiap bulan, tribulanan bahkan semesteran. Serta melakukan monitoring dengan menggunakan aplikasi Keuangan Daerah baik aplikasi internal seperti SAKTI, SIPPLA, e-asset, maupun aplikasi nasional seperti SIPD.

VI. PENUTUP


Pelaporan manajemen risiko ini dilakukan sebagai wujud proses atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dokumen ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga dapat menekan risiko yang mungkin terjadi secara bertahap dan berkelanjutan.

Serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya.

Lamongan, Mei 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. M.S. HERUWIDI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 198809 1 001